

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN PANITIA PENGAWAS
PEMILU DALAM PENGAWASAN PEMILU DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2014 SAMPAI TAHUN 2019

BERHAN ZALUKHU

Pemilihan umum diperlukan salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui Pemilihan umum, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang peranan pengawas Pemilihan umum di Kota Medan. Untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Medan dalam pengawasan Pemilu DPRD Kota Medan dan untuk mengkaji hambatan yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Medan dalam pengawasan Pemilu DPRD Kota Medan.

Pengaturan hukum tentang peranan pengawas Pemilu telah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu, hanya saja dalam undang-undang dan peraturan Bawaslu tersebut kinerja Panwaslu hanya bersifat rekomendasi saja tanpa dapat mengeksekusi. Panwaslu Kota Medan dalam kinerjanya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas. Panwaslu dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara menyeluruh. Struktur Panwaslu Kota Medan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang bersifat Adhoc dan membawahi Panwaslu Kecamatan seluruh Kota Medan.

Kasus yang ditemukan Panwaslu Kota Medan pada Pemilu legislatif 2014 berjumlah 246 (dua ratus empat puluh enam) kasus. 227 (dua ratus dua puluh tujuh) yaitu pelanggaran administratif oleh partai politik sejak Januari hingga Maret dan 19 (sembilan belas) pelanggaran pidana semenjak selama bulan Maret. “Agar Pelanggaran Pemilu tidak terjadi, maka KPU dan Panwaslu harus bisa menutup semua yang bisa dipakai caleg berbuat curang. Penyelenggaraan pemilu harus benar-benar mengawasi, mulai dari tingkat TPS hingga provinsi. Independensi penyelenggara pemilu merupakan harga mutlak agar Pelanggaran Pemilu tidak terjadi,” , Maka peran masyarakat mengawasi proses pemilu hingga penentuan hasil akhir nanti sangat penting. KPU, Panwaslu, parpol, caleg, dan masyarakat harus mengawasi dengan ketat proses penghitungan itu, sehingga suara yang telah diberikan rakyat untuk para wakil mereka di parlemen nanti tidak dimanipulasi oleh kepentingan tertentu

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Panwaslu, DPRD Kota Medan

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE ROLE OF THE COMMITTEE YURIDICAL
SUPERVISORY CONTROL OF ELECTION MEDAN CITY ELECTION
PARLIAMENT FIELD OF THE YEAR 2014 TO YEAR 2019

BERHAN ZALUKHU

Elections are one of the mechanisms required to realize the principle of popular sovereignty. Through elections, people not only choose the ones that will be his deputy in running the country, but also choose a program that will be the policy of the state in the next administration. This type of research in this thesis is empirical legal research. This study aims to examine the legal regulation of the regulatory role of elections in the city of Medan. To assess the implementation of the monitoring conducted Election Supervisory Committee of Medan in Medan City Council election monitoring and to assess the barriers faced by the Election Supervisory Committee of Medan in Medan City Council election monitoring.

Legal arrangements concerning the role of election supervisors have been accommodated in the Law No. 8 Year 2012 and Regulation Supervision Agency for the General Election Law No. 15 Year 2012 on Procedures for Election Monitoring, only in the laws and regulations of the Election Supervisory Body Supervisory Committee's performance is only just recommendations without being able to execute. Supervisory Committee of Medan in performance based on the principle of independent, honest, fair, legal certainty, orderly election management, public interest, transparency, proportionality, professionalism, accountability, efficient, and effective. Supervisory Committee was formed with the aim to ensure the implementation of the election of members of DPR, DPD and DPRD direct, general, free, confidential, honest, fair, and quality, as well as the implementation of legislation on the Election of Members of Parliament, Council, and Parliament as a whole. Structure Supervisory Committee Medan terdiri of three members who are Adhoc and Supervisory Committee oversees the entire subdistrict of Medan

Cases were found Supervisory Committee of Medan on the legislative elections in 2014 amounted to 246 (two hundred and forty-six) cases. 227 (two hundred and twenty-seven) is the administrative violations by political parties from January to March and 19 (nineteen) criminal offense since during March. "For Election Violations tidak occurs, then the Election Commission and the Election Supervisory Committee should be able to cover all the candidates that can be used to cheat. Election administration must really watch, ranging from polling stations to provincial level. The independence of election management is an absolute value that election violations did not happen," then the role of the community to oversee the election process of determining the final outcome will be very important. Commission, Supervisory Committee, political parties, candidates, and the public should closely monitor the counting process, so that the voice of the people who have given to their representatives in parliament not later be manipulated by special interests

Keywords : Analysis of Juridical, Supervisory Committee, Parliament of Medan City